

Village Food-Security Program Implementation in Kendalpecabean: Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Desa di Kendalpecabean

Mohammad Heri
Lailul Mursyidah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

General background: Food security is a national strategic issue and villages are crucial actors for local resilience. Specific background: Kendalpecabean Village started a food-security program in 2022 (post-COVID recovery) using village funds and infrastructure interventions (irrigation, pump houses) to mitigate flood-related crop failures. Knowledge gap: Despite budget allocations and infrastructure works, implementation obstacles remain in training, institutional coordination, and sustainable outcomes. Aims: This study analyzes program implementation using Edward III's framework (communication, resources, disposition, bureaucratic structure). Results: Qualitative data (interviews, observation, documents) show effective communication and commitment (disposition), concrete infrastructure investments (~Rp 262,000,000 in 2024), but limitations in sustained training and full operationalization of LP2B (land protection) regulations. Novelty: Provides empirically grounded account of a village-level LP2B response combining engineering and institutional measures. Implications: Policy should pair infrastructure investments with capacity-building, clearer LP2B regulation, and institutional support to convert investment into reliable increased yields.

Highlights:

- Village invested ~Rp 262,000,000 (2024) for irrigation and flood-control measures.
- Edward III framework finds communication and disposition relatively strong; training and LP2B regulation lag.
- Infrastructure alone limited—continuous capacity building and formal LP2B rules needed.

Keywords: Food Security; Village Program; LP2B; Irrigation Infrastructure; Edward III.

Pendahuluan

Ketahanan pangan adalah isu strategis dalam upaya membangun sebuah negara. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai ketahanan pangan karena menjadi pemasok utama makanan, terutama bagi negara-negara yang sedang dalam tahap perkembangan [1]. Sektor ini tidak hanya menjadi sasaran utama dalam pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan [2], ketahanan pangan merujuk pada kondisi dimana kebutuhan pangan dari tingkat negara hingga individu terpenuhi sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan pangan yang mencukupi, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, yang aman, bervariasi, bergizi, merata, terjangkau, dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, keyakinan, serta budaya masyarakat, dengan tujuan mendukung gaya hidup yang sehat, aktif, dan produktif secara berkesinambungan.

Ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari karakteristik produksi komoditas pangan yang bersifat musiman dan fluktuatif karena rentan terhadap perubahan iklim atau cuaca [3]. Kondisi produksi yang sangat dipengaruhi oleh faktor iklim dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ketersediaan pangan. Apabila pola produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tidak didukung oleh kebijakan pangan yang kokoh, hal ini dapat menimbulkan kerugian baik bagi para produsen maupun konsumen, khususnya mereka yang berada dalam golongan pendapatan rendah.

Manajemen ketahanan pangan tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup rumah tangga, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, serta keamanan nasional. Peran lembaga-lembaga pertanian dalam manajemen pangan sangat vital karena dalam praktiknya, pengelolaan pangan bukanlah tanggung jawab tunggal Kementerian Pertanian, tetapi melibatkan berbagai instansi lainnya [4]. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang optimal untuk menciptakan sinergi di antara instansi-instansi tersebut dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Konsep ketahanan pangan berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumen akan pangan [5]. Prioritas Nasional Ketahanan Pangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan sepanjang musim sehingga semua individu dapat mengaksesnya secara luas, dengan kuantitas, kualitas, dan jenis nutrisi yang memadai dan sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Hal ini membuka peluang bagi perdagangan luar negeri, baik dalam skala bilateral maupun multilateral, sehingga krisis pangan akibat ketidakseimbangan pasokan dan permintaan komoditas pertanian antar negara dapat diatasi melalui ekspor dan impor yang mengoptimalkan sumber daya antar negara secara efisien.

Tantangan dalam mencapai ketahanan pangan nasional tidak hanya terkait dengan peningkatan jumlah penduduk, tetapi juga disebabkan oleh berkurangnya lahan pertanian akibat konversi menjadi kawasan industri dan pemukiman. Hal ini menjadi tantangan dan ancaman dalam mencapai kemandirian dalam sektor pangan bagi Indonesia [6]. Pengembangan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan bersama dengan komunitas masyarakat untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh komunitas tersebut. Program pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengan mengadopsi kearifan lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan [7]. Kegiatan pengembangan masyarakat dapat berupa peningkatan keterampilan melalui pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan sumber daya alam [8].

Ketahanan pangan Indonesia akan kembali meningkat pada tahun 2022 setelah mengalami penurunan selama dua tahun sebelumnya akibat pandemi. Menurut Global Food Security Index (GFSI), indeks ketahanan pangan di Indonesia pada tahun 2022 mencapai level 60,2 yang artinya lebih tinggi dibandingkan dengan periode 2020-2021. Namun, saat ini, tingkat ketahanan pangan Indonesia sangat rendah; angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata dunia yang memiliki indeks 62,2 dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata Asia Pasifik yang memiliki indeks 63,4. Namun, dibandingkan dengan negara lain, GFSI mengamati bahwa harga pangan di Indonesia secara umum cukup masuk akal. Hal ini terlihat dari skor keterjangkauan Indonesia yang sebesar 81,4, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Asia Pasifik (73,4). Indonesia sejauh ini sudah berhasil membangun infrastruktur pertanian, sehingga kemungkinan besar penyediaan pangan bisa teratasi dengan baik. Selain itu, Indonesia harus meningkatkan kebutuhan nutrisi dan variasi makanan untuk meningkatkan kualitas pangan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ditahun 2024 memberikan dorongan intensif kepada setiap desa untuk mengembangkan inovasi dalam bidang ketahanan pangan, terutama dengan adanya kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan minimal 20 persen dari dana desa harus dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Saat ini, ketahanan pangan di Kabupaten Sidoarjo dalam menghadapi situasi darurat pangan (Indeks Ketahanan Pangan Global) dapat dilihat dari empat aspek utama. Pertama, daya beli masyarakat, dimana mayoritas penduduk Sidoarjo bekerja di sektor industri dengan pendapatan relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur, sehingga daya beli pangan masyarakat secara umum cukup baik. Namun, masih ada sebagian kecil masyarakat yang berpenghasilan rendah dan rentan terhadap fluktuasi harga pangan, sehingga mereka

memerlukan perhatian khusus terutama saat terjadi krisis pangan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan program bantuan dan subsidi pangan yang ditujukan untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu, Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo [9]. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan dan program sosial, termasuk bantuan pangan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sidoarjo.

Aspek kedua adalah ketersediaan pangan, dimana Kabupaten Sidoarjo memiliki lahan pertanian yang luas untuk produksi beras, sayuran, buah-buahan, dan palawija. Produksi pangan lokal di Sidoarjo saat ini mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan masyarakatnya. Namun, risiko gagal panen akibat serangan hama, banjir, atau kekeringan perlu diantisipasi dengan menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menjaga ketersediaan sarana produksi, irigasi, dan fasilitas pertanian lainnya guna mendukung produksi pangan yang berkelanjutan. Cadangan pangan darurat seperti beras, kedelai, dan bahan pokok lainnya disiapkan untuk mengantisipasi kekurangan pasokan akibat gagal panen. Diversifikasi pangan lokal didorong untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan terigu, contohnya dengan memperluas konsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, sagu, dan lainnya. Sarana logistik seperti gudang penyimpanan dan transportasi pangan darurat juga disiapkan dengan baik untuk menjaga ketersediaan pangan saat dibutuhkan.

Dengan persiapan yang matang dari hulu hingga hilir, diharapkan ketersediaan pangan di Sidoarjo tetap terjamin bahkan dalam situasi darurat seperti gagal panen. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meningkatkan pengawasan keamanan pangan, baik dari rantai pasok pangan lokal maupun pangan impor. Kerja sama dilakukan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan untuk memastikan pangan terbebas dari cemaran mikroba, logam berat, residu pestisida, dan zat berbahaya lainnya. Sertifikasi dan labelisasi halal diterapkan pada seluruh rangkaian pangan guna menjaga integritas kehalalan bagi konsumen muslim. Edukasi dan sosialisasi dilakukan kepada pelaku industri pangan untuk menerapkan manajemen keamanan pangan yang baik, seperti Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP).

Perjalanan Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Kendalpecabean telah dimulai sejak tahun 2022 sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pasca wabah Covid-19 yang telah melanda Indonesia. Dampak dari pandemi tersebut dirasakan oleh masyarakat desa kendalpecabean, dengan banyak pekerja yang terpaksa di-PHK. Pemerintah pusat merespons dengan mencanangkan Program Ketahanan Pangan sebagai langkah pemulihan ekonomi di tingkat desa, termasuk di Desa Kendalpecaben. Tahun 2024, dana sebesar Rp. 262.000.000 dialokasikan untuk kegiatan Program Ketahanan Pangan di sektor Pertanian. Pemerintah Desa Kendalpecabean merespons gagal panen yang terjadi akibat banjir di lahan pertanian dengan inovasi dalam bidang ketahanan pangan. Mereka mengalokasikan dana untuk pertanian dengan membangun saluran air irigasi, membuat pintu air dan rumah pompa guna mengurangi debit air di sawah, yang selama ini menjadi penyebab utama banjir dan merendam lahan pertanian warga desa. Dampak banjir pada lahan pertanian menyebabkan petani mengalami gagal panen pada tahun 2022. Melihat kondisi ini, Pemerintah Desa Kendalpecabean berupaya meningkatkan hasil panen petani dengan mengontrol debit air di sawah. Upaya ini membuahkan hasil, di mana pada akhir tahun 2023 petani berhasil panen, meskipun satu kali dalam satu tahun. Pada tahun 2024 petani juga berhasil panen padi sekali dalam satu tahun. Harapan petani desa Kendalpecabean kedepan dapat panen padi dua kali dalam setahun seperti yang dialami desa tetangga yakni desa Balongdowo. Tindakan proaktif ini memperlihatkan kepedulian serta komitmen pemerintah desa dalam memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Desa Kendalpecabean.

Pemerintah Desa Kendalpecabean secara konsisten mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk memperbaiki infrastruktur pertanian, seperti pembangunan saluran irigasi, pintu air, rumah pompa, serta kegiatan pengendalian hama. Komitmen ini tidak hanya ditujukan untuk mengurangi risiko gagal panen akibat banjir, tetapi juga untuk meningkatkan hasil panen petani secara berkelanjutan.

Tabel 1. Dukungan Anggaran terkait ketahanan pangan di Pemerintah Desa Kendalpecabean Candi

No.	Nama Program	Penerima Manfaat	Tahun 2023	Tahun 2024	
01	Pembangunan saluran irigasi dan Pembuatan pintu air	Petani	Rp. 209.000.000,-	Rp. 242.000.000,-	
02	Pembuatan rumah pompa	Petani	Rp. 25.000.000,-	-	

03	Pengumpanan hama tikus	Petani	Rp. 20.000.000,-	-	
04	Normalisasi saluran air irigasi	Petani	Rp. 20.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi (2025)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa anggaran ketahanan pangan di tahun 2023 dan 2024 terserap untuk pembangunan saluran irigasi atau plengsengan, tujuannya untuk menahan air yang masuk ke area pertanian yang berlebihan karena area pertanian di desa Kendalpecabean cukup rendah, kurang lebih 3,5 meter dari permukaan laut [10]. Pembangunan saluran irigasi ini menelan biaya yang sangat besar karena volume pembangunannya cukup besar. Pembuatan Pintu air dilakukan bertujuan untuk mengontrol keluar masuknya air yang masuk ke area pertanian. Pembangunan rumah pompa sebagai tempat pompa air yang digunakan untuk menguras air yang berlebihan yang menggenangi lahan pertanian. Pengumpanan hama tikus dilakukan agar populasi tikus dapat di kurangi sehingga kerusakan padi atau tanaman selain padi akibat serangan hama tikus dapat diatasi. Normalisasi saluran irigasi dilakukan untuk membersihkan sampah atau tumbuhan yang menghambat jalanya air yang masuk ke area pertanian. Pada tahun 2024 pengumpanan tikus tidak dianggarkan akan tetapi tetap dilakukan dengan swadaya masyarakat petani. Hubungan program tersebut dengan ketahanan pangan adalah untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dan jika program tersebut tidak dilaksanakan maka petani Desa Kendalpecabean dalam satu tahun tidak bisa menanam padi.

Manfaat dari program ketahanan pangan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh warga Desa Kendalpecaben. Produksi pangan yang seharusnya diproduksi melalui upaya inisiatif dan inovasi para petani masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara optimal, menunjukkan bahwa program ini perlu diperkuat untuk mendorong kemandirian pangan di desa tersebut. Belum adanya menyelenggarakan pelatihan yang difokuskan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Padahal seharusnya pelatihan tersebut harus dirancang khusus untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam berbagai aspek pengelolaan dan teknik pertanian yang lebih baik. selain itu juga termasuk cara mengelola hasil pertanian agar dapat dioptimalkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh komunitas. Karena belum adanya pelatihan yang diberikan, sehingga para petani masih belum mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, diharapkan adanya pelatihan dan penyuluhan yang berkelanjutan agar pengelolaan sumber daya pangan akan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan tujuan ketahanan pangan yang diinginkan dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat Desa Kendalpecaben secara keseluruhan dapat meningkat. (hasil observasi tanggal 07 November 2024).

Permasalahan terkait dengan ketahanan pangan ini juga terjadi pada beberapa desa yang ada di daerah, hal ini terlihat dari beberapa penelitian terdahulu pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Duwie Putra dan rekan-rekannya pada tahun 2022 dengan judul "Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Ketahanan Pangan di Kota Palembang" [11] menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi kebijakan memberikan dampak sebesar 90,3% terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kota Palembang, yang didukung oleh nilai validitas yang tinggi pada indikator unsur pemerintah. (2) Pemberdayaan masyarakat berpengaruh sebesar 99,2% terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kota Palembang, dengan nilai validitas tertinggi pada indikator usaha/industri rumah tangga. (3) Implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat secara bersama-sama memberikan dampak sebesar 99,2% terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kota Palembang, dengan nilai validitas tertinggi pada indikator persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai. Penelitian ini memberikan gambaran yang signifikan tentang pentingnya implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tertentu, seperti Kota Palembang.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Firma Yudha dan Andi Sep Kurniawan pada tahun 2022 dengan judul "Peran Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karangmangu dalam Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Desa Pondok Nongko, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi" [12] menunjukkan keberhasilan POKMAS Karangmangu dalam memberdayakan ibu rumah tangga di Dusun Krajan agar dapat mandiri dan mampu mengelola lahan pekarangan. Penelitian ini memberikan gambaran positif tentang peran penting POKMAS dalam meningkatkan kemandirian dan keterampilan ibu rumah tangga dalam mengelola lahan pekarangan di desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa melalui kolaborasi dan kerja sama dalam kelompok masyarakat, dapat tercapai peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan di tingkat lokal.

Ketiga, Penelitian oleh Rosanti Padangang pada tahun 2023 dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pembukaan Lahan Ketahanan Pangan di Desa Beka sebagai Desa Percontohan" [13] menunjukkan bahwa pembukaan lahan-lahan ketahanan pangan memiliki peran yang sangat penting. Ini memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah memperoleh makanan yang

aman dan bergizi. Namun, untuk mencapai ketahanan pangan yang efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu meningkatkan produktivitas, kualitas pangan, dan sistem distribusi. Dengan demikian, upaya pembukaan lahan pangan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan secara keseluruhan.

Untuk mengukur implementasi kebijakan program ketahanan pangan pada kelompok tani (POKTAN) di Desa Kendalpecaben Kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo, peneliti menggunakan teori Edward III yang terdiri dari 4 faktor pendukung dalam keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan program ketahanan pangan ini. (1) Komunikasi, yaitu informasi tentang kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar mereka dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai harapan. (2) Sumber Daya, Mengenai sumber daya, faktor ini memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan Edward III menyatakan bahwa sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. (3) Disposisi, Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan dapat terwujud. (4) Struktur Birokrasi, yaitu struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi [14]. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi program ketahanan pangan yang telah dilaksanakan di Desa Kendalpecaben.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Kendalpecaben Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian adalah Implementasi Ketahanan Pangan di Desa Kendalpecaben Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Untuk menentukan informan peneliti menggunakan Teknik purposive sampling yang melibatkan kepala desa, pelaksana kegiatan ketahanan pangan (Kasi Kesra), Kaur Keuangan, dan Ketua Kelompok Tani (POKTAN) yang dianggap mempunyai keterkaitan dalam program ketahanan pangan di Desa. Sedangkan untuk pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penyajian data adalah penyusunan, integrasi, dan informasi turunan. Penyajian data disini dimaksudkan untuk membantu peneliti melakukan analisis data secara detail. Sedangkan konsep Miles Huberman [15] dipergunakan untuk menganalisis data melalui 4 tahapan (1) Pengumpulan Data, adalah proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti berdasarkan cakupan penelitian. (2) Reduksi Data merupakan proses pemilahan, pemfokusan, pengabstraksi, dan transformasi data hasil penelitian dari lapangan. (3) Penyajian Data adalah pengumpulan data yang disusun secara terstruktur untuk memungkinkan penarikan kesimpulan. (4) Penarikan Kesimpulan adalah kegiatan untuk menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan pada pendahuluan.

Hasil dan Pembahasan

Ketahanan pangan adalah kemampuan suatu daerah atau bangsa untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan. Di Indonesia, desa sebagai unit terkecil dari pemerintahan memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dengan populasi yang besar dan keragaman potensi alam, desa memiliki peluang besar untuk menghasilkan pangan lokal yang berkualitas. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mendukung ketahanan pangan di tingkat desa, beberapa program unggulan telah dirancang untuk dijalankan melalui Dana Desa pada tahun 2025. Program-program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga mengoptimalkan rantai pasokan dan nilai tambah produk pangan lokal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui pendekatan teknologi tepat guna dan inovasi di lapangan. Beberapa kegiatan yang dapat dijalankan meliputi: a) Penyediaan Alat dan Bibit Unggul: Dana Desa dapat digunakan untuk menyediakan alat pertanian modern, bibit unggul, serta pupuk yang ramah lingkungan. b) Penerapan Teknologi Pertanian: Penerapan teknologi seperti irigasi tetes, penggunaan sensor kelembapan tanah, dan teknik pertanian presisi untuk memaksimalkan hasil panen. c) Pelatihan dan Penyuluhan: Mengadakan pelatihan bagi petani mengenai teknik bercocok tanam modern, pengelolaan hama terpadu, dan diversifikasi tanaman.

Dari penjelasan ketahanan pangan diatas, Implementasi program ketahanan pangan sepenuhnya belum dirasakan oleh seluruh warga Desa Kendalpecaben. Produksi pangan selain padi di Desa kendalpecaben juga memiliki hasil panen seperti terong, cabe dan kacang, namun hasil panen yang paling jadi perhatian selama ini adalah padi dimana yang seharusnya diproduksi melalui upaya inisiatif

dan inovasi para petani masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara optimal, menunjukkan bahwa program ini perlu diperkuat untuk mendorong kemandirian pangan di desa tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelenggarakan pelatihan yang difokuskan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Pelatihan tersebut harus dirancang khusus untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam berbagai aspek pengelolaan dan teknik pertanian yang lebih baik. Hal ini juga termasuk cara mengelola hasil pertanian agar dapat dioptimalkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh komunitas. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, diharapkan pengelolaan sumber daya pangan akan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya untuk mengukur implementasi kebijakan program ketahanan pangan pada kelompok tani (POKTAN) di Desa Kendalpecaben Kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo, peneliti menggunakan teori Edward III yang terdiri dari 4 faktor pendukung dalam keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan program ketahanan pangan sebagai berikut:

A. Komunikasi

Komunikasi yang efektif dipengaruhi oleh kejelasan terhadap penyampaian informasi antara pelaksana terhadap sasaran, sehingga diperlukan pengetahuan yang cukup untuk dimiliki seorang pemberi komunikasi. Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan yang telah dibuat dapat disosialisasikan secara keseluruhan dan bisa diterima dengan baik, sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Hal ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran (Poktan) atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Desa Kendalpecaben ini diamanatkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sidoarjo, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. Koordinasi yang terjadi dalam kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini dimulai dari Bappeda yang memberikan informasi peruntukan suatu daerah sesuai dengan penataan ruang wilayah. Kemudian hasil dari data di Bappeda diproses ke Dinas Pertanian, dimana Dinas Pertanian ini mempunyai tugas sebagai pelaksana pertimbangan teknis dalam pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan surat rekomendasi peruntukan wilayah dari Bappeda. Secara umum mengenai komunikasi dalam implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini masih belum efektif dan menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dilihat dari koordinasi yang terbentuk masih mengacu pada koordinasi di atasnya yaitu koordinasi dalam BKPRD dan belum dibentuknya Tim LP2B khusus serta dalam pemberian sosialisasi, pelaksana kebijakan masih merasakan kebingungan mengenai lahan pertanian terlebih lahan pertanian yang mengalami genangan air yang berlebih atau banjir baik dimusim hujan maupun luapan air sungai dari daerah lain, seperti halnya di Desa Kendalpecaben hasil panen 3 tahun terakhir mengalami penurunan secara signifikan, hal ini terjadi karena tingginya luapan air sungai dan sawah sama, sehingga saat air sungai tinggi pasti meluap juga ke area sawah dan luapan air ini menggenangi di area sawah setinggi ukuran padi yang mau dipanen dan air ini menggenangi cukup lama, apabila ada tanaman padi yang baru di taman atau mau panen akibatnya akan rusak dan gagal panen. Selanjutnya permasalahan ini sudah dikomunikasikan ke pemerintah setempat terutama para perangkat Desa Kendalpecaben, dari hasil penelitian para petani ini menginginkan agar ada solusi terbaik bagaimana mengatasi luapan air dari sungai tersebut, berikut hasil wawancara dan dokumentasi musyawarah para warga terutama petani dengan pemerintah setempat Desa Kendalpecaben:



Gambar 1. Kegiatan rapat musyawarah petani Desa Kendalpecaben 2024
Sumber : Diolah dari Poktan Desa Kendalpecaben 2024

Melihat gambar 1 terkait musyawarah petani Desa Kendalpecaben yang telah berlangsung pada tanggal 19 Januari 2024 terkait pertemuan musyawarah tersebut bertujuan untuk membicarakan penurunan hasil panen karena banjir dan hama tikus yang dialami oleh petani setempat kegiatan tersebut dilakukan di salah satu rumah warga desa, Musyawarah dihadiri perangkat desa termasuk Sekretaris Desa, penyuluh pertanian kecamatan candi dan dinas pertanian kabupaten Sidoarjo. untuk

bersama-sama memecahkan masalah yang ada, komunikasi ini membawa manfaat bagi para petani yang secara langsung bisa menyampaikan terkait keluhan kesahnya kepada pemerintah desa, dan sangat berharap agar kedepan bisa diberikan solusi terbaik untuk semua para petani, agar tidak terjadi gagal panen lagi hanya karena kendala banjir, kemungkinan pemerintah desa akan memperbaiki infrastruktur agar tidak terjadi banjir yang meluap ke sawah petani. Berikut hasil wawancara bersama Kepala Desa setempat:

“Saya selaku Kepala Desa disini sudah melakukan musyawarah bersama warga setempat terutama para petani desa bersama-sama mencari solusi terbaik agar tidak sampai terjadi gagal panen, hal ini setelah saya amati memang perlunya ada pembenahan pada sungai, baik mulai dari pengerukan dilanjutkan perbaikan tepi sungai ini harus lebih ditinggikan agar mampu menambut debit air meskipun tinggi apalagi saat musim hujan, karena memang luapan air ini terus kesawah warga terlebih sawah ini kebanyakan datarannya lebih rendah juga, makanya mas heri ini selanjtnya akan kami tindak lanjuti solusi yang telah disepakati bersama” (Kades Kendalpecabean)

Dan berikut hasil wawancara bersama warga atau petani setempat:

“Kami selaku warga yang mempunyai lahan sawah sebagai salah satu mata pencarian dan ekonomi keluarga merasa pusing sekaligus sedih karena gagal panen karena banjir yang menggenang ke arah pemukiman sawah kami, terlebih padi sudah mau dipanen tapi ketinggian air yang menggenang hampir sama dengan ukuran padi tersebut, bahkan tidak terlihat sudah padi kami karena luapan air ini, kami mohon ada solusi terbaik dari pemerintah desa setempat.” (Warga Petani Desa Kendalpecabean)

Dari hasil dokumentasi serta wawancara, Implementasi komunikasi sudah dilakukan dengan baik antar warga dengan pemerintah setempat, hal ini menunjukkan kepedulian dan juga kerjasama yang baik untuk memecahkan masalah yang ada, karena Komunikasi yang efektif antara warga dan pemerintah desa merupakan salah satu pilar utama dalam membangun pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, disis lain Komunikasi Publik Desa juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif warga dalam membangun desanya. Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa teori komunikasi implementasi kebijakan Edward III di Desa Kendalpecabean sudah sesuai dan berjalan dengan baik, sebagaimana kebijakan komunikasi, yaitu informasi tentang kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar mereka dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai harapan.

B. Sumber Daya

Sumber daya menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kesadaran implementor, kebijakan kurang dapat perhatian dan bisa diam ditempat serta berjalan lambat dan seadanya. Sumber daya finansial menjamin keberlangsungannya program/kebijakan. tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Secara umum sumber daya dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dikatakan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam sektor pertanian salah satu jenis sumber daya utama adalah modal, modal dalam hal ini satu-satunya milik petani adalah tanah, Setelah tanah, modal adalah faktor nomor dua paling penting dalam produksi pertanian dalam arti sumbangannya pada nilai produksi. Dalam pengertian ekonomi, modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor- faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru yaitu, dalam hal ini, hasil pertanian.

Hal ini dapat dilihat dalam instansi salah satu pengampu kebijakan yaitu Bappeda, di instansi tersebut disebutkan dalam hasil wawancara bahwa hanya terdiri satu orang yang mengampu kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan kebijakan. Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo adanya UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja merupakan omnibus law terhadap UU 41/2009 yang memberikan penegasan yang mendasar bahwa LP2B adalah bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW Kabupaten. Kemudian dipertegas dalam Pasal 23 ayat (3) bahwa Penetapan KP2B kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten. Selain itu UU 6/2023 mengatur bahwa Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dilihat dari anggaran, seharusnya di Tahun 2025 ini bisa terwujudnya peraturan daerah tentang LP2B, namun faktanya hingga saat ini masih dalam tahap proses identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Terkait tugas tersebut masih menyatu dalam bidang infrastruktur dan tata ruang, sehingga tidak salah jika dalam

kurun waktu selama 3 tahun setelah Peraturan Daerah disahkan masih banyak yang membuat kebingungan diantara pelaksana kebijakan tersebut. Berikut hasil dokumentasi lahan persawahan dan wawancara bersama warga Desa Kendalpecabean:



Gambar 2. Keadaan sawah petani yang tergenang banjir Desa Kendalpecabean (2024)
Sumber : Diolah dari Poktan Desa Kendalpecabean 2024

Melihat dari gambar 2 atau dokumentasi sawah petani yang tergenang banjir kemungkinan besar sudah gagal panen, hal ini yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa setempat. Bagaimana tindakan dan juga solusi terbaik agar tidak terjadi hal serupa, dari tahun ketahun tidak ada perubahan dan banjir semakin tinggi, padahal bila dilihat di desa sebelah hasil panen masih tinggi dan memang tidak terjadi banjir pada sawah petani. Hal yang sama diharapkan oleh petani Dsa Kendalpecabean agar hasil penen semakin meningkat tanpa ada kendala banjir. Berikut beberapa hasil wawancara bersama bendahara dan Sekdes:

“Melihat lahan sawah dengan gagal panen membuat kami selaku pemerintah desa merasa gagal juga dalam melindungi para petani dari gagal panen, saluran air dan juga banjir kiriman atau rab itu menjadi bagian masalah yang perlu perhatian khusus agar tidak terjadi kejadian yang berulang, hal ini PR besar bagi kami karena melihat posisi sawah itu sebetulnya aman dan sudah sesuai standarnya, namun memang harus ada perubahan infrastruktur Desa terutama pada bagian sungai harus ada perbaikan, karena memang 3 tahun terakhir ini kami lihat apa yang telah dilakukan petani sudah benar cara menanam dan merawat padi sudah betul, hasil panen desa sebelah juga bertahan serta meningkat, namun di Desa Kendalpecabean malah menurun akibat dari banjir secepat mungkin akan kami lakukan tindakan sebagaimana mestinya untuk menanggulangi hal ini agar tidak berlarut-larut. Kami juga butuh sumber daya yang bisa diajak kerjasama, Kami yakin dengan sumber daya manusia tau fisik dan juga sumber daya anggaran yang ada secepat mungkin bisa mengatasi masalah ini.” (Sekdes Desa Kendalpecabean)

“Mengenai anggaran yang akan dialokasikan memang ada hubunganyadengan perbaikan pertanian,dan anggaran desa yang dianggarkan untuk infrastruktur akan berdampak untuk semua, Melalui dana Desa, pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan perekonomian desa, mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di desa. Dengan demikian, Dana Desa berfungsi sebagai alat untuk mempercepat pembangunan yang berkeadilan, InsyaAllah 2026 petani Desa Kendalpecabean aman dari banjir dan sukses dalam panen.” (Bendahara Desa)

Dari hasil pernyataan wawancara serta dokumentasi implementasi kebijakan Edward III pada indikator Sumber Daya sudah sesuai apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Kendalpecabean, hal ini terlihat dari hasil wawancara bahwa pemerintah desa secepatnya akan memperbaiki infrastruktur desa yang berdampak untuk semua, dan infrastruktur perbaikan sungai akan membawa dampak sangat besar bagi para petani. Karena kesejahteraan petani di desa melibatkan lebih dari sekadar pendapatan finansial mereka. Ini juga berkaitan dengan akses mereka terhadap lahan pertanian, teknologi pertanian yang canggih, pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan hukum. Semua hal ini secara langsung mempengaruhi kualitas hidup petani dan keberlangsungan pertanian mereka. Kesejahteraan petani di desa bukan hanya tentang meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga memastikan keberlanjutan pertanian dan stabilitas pangan di negara ini.

C. Disposisi

Disposisi menunjuk karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa tahan terhadap hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Sikap atau respon dari implementor dilihat dari seberapa besar komitmen yang dibangun dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Komitmen dan kompetensi merupakan dua syarat yang harus dimiliki oleh personel yang diberi mandat untuk mencapai tujuan kebijakan dalam implementasi. Komitmen merujuk pada kesungguhan seorang personel untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh, memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk menjalankan tugasnya tersebut dan menggunakan segala potensi yang dimilikinya untuk mencapai hasil yang telah dibebankan oleh organisasi terhadap diri personelnnya. (dalam Indiahono, 2009;32) Mengenai Disposisi dalam implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaannya. Disposisi dilihat dari komitmen atau sikap pelaksana kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan ini menjadi faktor pendorong.

Hal ini dilihat dari adanya komitmen yang dibangun oleh pejabat pengampu kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini cukup tinggi. Seperti yang dilakukan oleh Bappeda terkait pelanggaran alih fungsi lahan pertanian terhadap seharusnya lahan dilindungi, yang dengan memberikan sanksi berupa surat peringatan untuk tidak dibangun dan tidak memberikan ijin untuk membangun bangunan di wilayah tersebut. Selain itu juga, dilihat dari visi misi pemimpin kepala daerah yang memang mengutamakan pembangunan salah satunya di bidang Pertanian. Sehingga disisi lain membangun pertanian juga harus mampu mengutamakan pengendalian terhadap pembangunan tersebut seperti adanya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Seperti halnya perlindungan pertanian yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Kendalpecabean berkomitmen akan mengupayakan apa yang menjadi harapan petani kedepan yakni agar pertanian di desa Kendalpecabean tanpa hambatan banjir, hal ini sudah menjadi kewajiban dan perhatian khusus bagi para Pemdes untuk kesejahteraan para petani desa. Hal ini terlihat bagaimana upaya Pemdes dengan melakukan evaluasi ulang dan juga berkoordinasi dengan tetangga desa tetangga yang sudah panen dua kali pertahun, karena bila dilihat hasil panen desa tetaangga baik-baik saja namun di Desa Kendalpecabean hanya bisa panen satu kali dalam setahun. Total luasan area pertanian di Desa Kendalpecabean 74 ha, terbagi menjadi dua poktan, Poktan sidorukun I terletak di dusun Kendal Cabe dengan luasan 42 ha. Poktan sidorukun II terletak di Dusun Kendal Doyong dengan luasan 32 ha, Sebelum kita bangun infrastruktur petani di Desa Kendalpecabean khususnya poktan II mengalami gagal panen, jadi dalam satu tahun tidak pernah panen sama sekali ini terjadi di tahun 2022 dan tahun 2023 berhasil namun hanya satu kali panen dalam setahun di musim kemarau, untuk tahun 2024 petani mencoba bercocok tanam dua kali, di musim penghujan dan kemarau, akan tetapi yang di musim penghujan gagal panen hanya Sebagian kecil saja padi yang bisa dipanen. Sedangkan yang ditanam di musim kemarau berhasil panen, dan hasilnya bisa mencapai kurang lebih 7,5 ton/ha. Berikut hasil wawancara beserta dokumentasi panen padi di musim kemarau poktan sidorukun II Desa Kendalpecabean:



Gambar 3. Kegiatan panen bersama penyuluh pertanian Kecamatan Candi (2024)
Sumber : Diolah dari Poktan Desa Kendalpecabean 2025

Dari gambar 3 kita bisa melihat para petani bersama penyuluh pertanian dari kecamatan memanen hasil padi tanam di musim kemarau hasilnya masih bisa normal, Namun berbeda panen pada musim penghujan, panen sangat menurun meskipun jumlahnya tidak banyak namun setidaknya masih bisa dipanen dengan hasil padi yang kurang bagus. Hasil panen padi yang tegenang banjir memang terbilang

kurang bagus banyak yang kopong dan juga ada yang menghitam padinya, hal ini menjadikan keresahan para petani desa karena tidak sedikit ongkos perawatan mulai awal hingga panen, dari harga bibit, harga pupuk dan juga belum ongkos para buruh tander atau saat cocok tanam. Namun hasil panen yang diterima tidak sepadan, upaya para petani tetap semangat untuk melakukan perbaikan dengan meminta bantuan pemerintah setempat sehingga pemdes juga ikut turun secara langsung kesawah melihat panen para petani Desa Kendalpecabean, dan musim penghujan di tahun 2025 para petani tidak berani mencoba untuk menanam padi karena kondisi lahan tergenang air dan cukup parah, setelah musim penghujan selesai di tahun 2025 petani akan tetap mencoba untuk menanam kembali padi, dengan harapan kedepan bisa taman padi meskipun dimusim hujan dengan panen tetap dua kali dalam satu tahun seperti layaknya pada desa tetangga (Desa Balongdowo), berikut hasil wawancara bersama warga atau petani setempat:

“Meskipun sawah kami terbilang gagal panen karena banjir, kami tidak membiarkan begitu saja, kami terus berupaya mengais sisa-sisa padi yang ada, kami percayakan kepada pihak Pemdes setempat yang tentunya akan mengupayakan yang terbaik untuk solusi dari permasalahan ini.” (Warga Petani Desa Kendalpecabean)

“Kami Pemdes turun secara langsung melihat para petani yang maasih dengan semangatnya memanen hasil padi yang masih bisa digunakan, yang tidak tergenang air memang dari gagal panen di wilayah Poktan Sidorukun I dan II, Sidorukun I terletak di Dusun Kendal Cabe Desa Kendal pecabean dengan luasan 15 ha. Sedangkan Sidorukun II terletak di dusun Kendal Doyong dengan luasan 30 ha dan Sebagian masih bisa dipanen dari sisa padi yang tidak terendam banjir” (Pemdes Kendal Pecabean)

Dari hasil pernyataan dan juga dokumentasi beserta wawancara terkait indikator disposisi dari teori implementasi kebijakan Edward III Pemdes Kendal pecabean dalam penanganan Poktan sudah sesuai dan berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari hasil wawancara pemdes bahwasannya ada komitmen untuk mengatasi permasalahan ayang ada dan disambut para petani ada kemauan sehingga kerjasama antara pemangku kebijakan dan juga para petani mampu memberikan perubahan secara signifikan untuk keberhasilan para petani, sebagaimana Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan dapat terwujud

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini menilai terhadap mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program atau kebijakan. SOP yang baik adalah yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Mengenai Struktur Birokrasi dalam Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini menjadi faktor penghambat. Hal ini dilihat dari belum adanya standar operasional prosedur yang mengatur mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal tersebut masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebingungan di antara para pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dari Bappeda menyatakan bahwa standar operasional prosedur yang mengatur masih mengacu pada standar operasional prosedur di atasnya yaitu mengenai penataan ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Pertanian di Desa Kendalpecabean memainkan peran penting dalam perekonomian desa karena masih banyak penghasilan utama warga adalah dari pertanian. Selanjutnya seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang semakin meningkat, struktur organisasi kelompok tani tentunya menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan hasil pertanian sekaligus kesejahteraan petani. Implementasi kebijakan Edward III menyatakan bahwa struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dari aspek Struktur birokrasi terbentuklah struktur organisasi kelompok tani di Desa Kendalpecabean dengan adanya struktur organisasi yang baik, petani dapat bekerja secara efisien, berbagi pengetahuan dan sumber daya, serta meningkatkan akses ke pasar. Hal ini membantu meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani secara keseluruhan. Berikut hasil wawancara bersama Ketua Poktan Desa Kendalpecabean:

“Kami sudah memberntuk struktur organisasi Poktan dengan tujuan memberikan termasuk: Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya pertanian. Meningkatkan akses ke teknologi dan informasi terbaru. Serta Mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Beberapa hal tersebut sangat penting dan harus ada beberapa anggota sebagai

pelopor Poktan agar segala sesuatu baik informasi atau permasalahan yang ada bisa diatasi dengan baik” (Ketua Poktan)

Dari hasil wawancara bersama ketua Poktan sudah dilakukan secara baik dan terarah selaku ketua Poktan, baik mengenai informasi dan juga peningkatan akses teknologi dan juga sudah adanya struktur organisasi desa yang mendukung sumberdaya pertanian, hal ini juga disampaikan oleh pengurus Poktan terkait struktur birokrasi, berikut hasil wawancara bersama pengurus Poktan:

“Sebagai pengurus Poktan kami sudah diberikan tugas dan binaan masing-masing sesuai dengan tupoksinya, tugas dan binaan seperti pelatihan terkait perkembangan seputar pertanian pelatihan yang kami dapatkan akan kami berikan langsung ke warga Poktan dengan agenda pertemuan yang sudah ditentukan” (Pengurus Poktan)

Selain penjelasan dari ketua Poktan dan juga pengurus, selaku Kades Kendalpecabean ikut serta memberikan pengawasan terhadap tupoksi Poktan yang sudah terbentuk agar kedepannya apa yang sudah menjadi tugas dan program yang sudah direncanakan mampu berjalan dengan baik, berikut hasil wawancara bersama Bapak Kades :

“Menurut saya dengan adanya organisasi Poktan ini banyak membawa dampak positif secara signifikan, jadi Satu praktik terbaik dalam struktur organisasi kelompok tani terbaru adalah menjalin kemitraan dengan pihak ketiga, seperti perusahaan pengolah pangan atau pengepul produk pertanian. Melalui kemitraan ini, petani dapat memiliki akses ke pasar yang lebih luas dan mendapatkan harga yang lebih adil untuk produk mereka“(Kades)

Dari hasil wawancara para pemangku kebijakan Poktan, apa yang sudah semestinya dan seharusnya dilakukan oleh Pengurus sudah dilakukan dengan baik, berikut disertakan pengurus Poktan beserta tupoksinya :

Tabel 2. Pengurus Poktan beserta Tupoksinya Desa Kendalpecabean (2025)

Pengurus Poktan Sidorukun I SK Poktan NO.16 Tahun 2001			
No	Nama Pengurus	Jabatan	Tupoksi
1	Sutrisno	Ketua	Pengambilan keputusan, koordinasi, dan perwakilan kelompok tani serta Bertugas memimpin organisasi petani dan bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan organisasi.
2	Usman Afandi	Sekretaris	Administrasi, pencatatan kelompok tani.
3	Abdul Kodir	Bendahara	Pencatatan dan pengelolaan keuangan
4		Koordinator Poktan	Promosi produksi pertanian, pemasaran, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.
Pengurus Poktan Sidorukun II SK Poktan NO.15 Tahun 2001			
No	Nama Pengurus	Jabatan	Tupoksi
1	Mistar	Ketua	Pengambilan keputusan, koordinasi, dan perwakilan kelompok tani serta Bertugas memimpin organisasi petani dan bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan organisasi.
2	Sulton	Sekretaris	Administrasi, pencatatan kelompok tani.
3	Sri Warni	Bendahara	Pencatatan dan pengelolaan keuangan
4	Sutrisno	Koordinator Poktan	Promosi produksi pertanian, pemasaran, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.

Sumber: Pemerintah Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi (2025)

Melihat dari pernyataan hasil wawancara dan juga Pengurus Poktan beserta Tupoksinya Desa Kendalpecabean, Implementasi struktur birokrasi dengan teori implementasi kebijakan Edwar III Struktur Birokrasi, yaitu struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Selain posisi-posisi di atas Pengurus Organisasi Poktan Desa kendapecabean, struktur kepengurusan dalam kelembagaan petani juga sudah terdapat beberapa seksi atau bidang,

seperti: Seksi Produksi: Bertugas menangani kegiatan produksi, seperti pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Seksi Pemasaran: Bertugas menangani kegiatan pemasaran hasil pertanian. Seksi Keanggotaan: Bertugas mengelola keanggotaan organisasi dan menjaga hubungan baik dengan anggota.

Secara keseluruhan, struktur kepengurusan dalam kelembagaan petani sangat penting untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan struktur kepengurusan yang baik, organisasi petani dapat menjadi wadah yang efektif untuk membantu petani dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Maksud dan tujuan kelembagaan ekonomi petani perlu struktur organisasi yang jelas adalah untuk Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi petani. Struktur organisasi yang jelas akan membantu petani dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang tegas. Hal ini dapat membantu petani dalam menjalankan kegiatan usaha tani dengan lebih efisien dan efektif. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan kelembagaan ekonomi petani. Struktur organisasi yang jelas akan membantu dalam penetapan prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan yang baik. Dengan demikian, pengelolaan kelembagaan ekonomi petani menjadi lebih transparan dan akuntabel. Mempermudah pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan usaha tani. Struktur organisasi yang jelas akan membantu dalam identifikasi pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan tertentu. Hal ini dapat membantu dalam mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi usaha tani. Mencegah terjadinya konflik antar anggota kelembagaan ekonomi petani. Struktur organisasi yang jelas akan membantu dalam menetapkan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota. Hal ini dapat membantu dalam mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik antar anggota.

Simpulan

Kesimpulan

Implementasi program ketahanan pangan di Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini sudah dilaksanakan semenjak Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Di Kabupaten Sidoarjo disahkan. Namun hingga saat ini ketiga strategi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo terkait Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum mampu berjalan dengan baik. Hal ini mengingat karena belum terbentuknya regulasi yang mengatur LP2B secara khusus. Dari hasil Implementasi kebijakan menurut teori Edwar III Sebagai berikut: Pertama, Implementasi komunikasi sudah dilakukan dengan baik antar warga dengan pemerintah setempat, hal ini menunjukkan kepedulian dan juga kerjasama yang baik untuk memecahkan masalah yang ada, karena Komunikasi yang efektif antara warga dan pemerintah daerah merupakan salah satu pilar utama dalam membangun pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua Sumber Daya sudah sesuai apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Kendalpecabean, hal ini terlihat dari hasil wawancara bahwa pemerintah desa secepatkan akan memperbaiki infrastruktur desa yang mampu berdampak untuk semua dari anggaran desa, dan infrastruktur perbaikan sungai akan membawa dampak sangat besar bagi para petani. Ketiga disposisi dari teori implementasi kebijakan Edward III Pemdes Kendal pecabean dalam penanganan Poktan sudah sesuai dan berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari hasil wawancara pemdes bahwasannya ada komitmen untuk mengatasi permasalahan yang ada dan disambut para petani ada kemauan sehingga kerjasama antara pemangku kebijakan dan juga para petani mampu memberikan perubahan secara signifikan untuk keberhasilan para petani, sebagaimana Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan dapat terwujud. Keempat Struktur Birokrasi, yaitu struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Faktor ini sangat membantu dalam mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi usaha tani. Mencegah terjadinya konflik antar anggota kelembagaan ekonomi petani. Struktur organisasi yang jelas akan membantu dalam menetapkan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota. Hal ini dapat membantu dalam mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik antar anggota.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat tauhid dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang "Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo" hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini khususnya istri, anak, keluarga dan Pemerintah Desa Kendalpecaebean tempat dimana saya melakukan

penelitian ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

References

- [1] D. Lestari, "Implementasi Kebijakan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh," Master's thesis, 2021.
- [2] S. U. Faizah, "Pengaruh Implementasi Surat Digital (Suradi) Terhadap Efisiensi Operasional di Sekretariat Daerah Kota Malang," Master's thesis, 2025.
- [3] W. Y. Widiyaningrum, "Kajian Teoritis: Strategi Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Secara Daring," *Justice Journal of Law*, vol. 1. [Online]. Available: <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>
- [4] N. S. Maisaroh and I. Rodiyah, "Implementation of The Electronic Service Manuscript Application Program (E-Buddy) In The Prasung Village Government, Buduran District, Sidoarjo Regency," Master's thesis, 2023.
- [5] N. A. Rani, R. Samin, and Okparizan, "Strategi Pengembangan E-Government Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Tanjungpinang," 2023. doi: 10.47828/jianaasian.v11i1.153.
- [6] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 2024.
- [7] A. Arief and M. Y. Abbas, "Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, vol. 8, no. 1, 2021.
- [8] M. Bintang and M. Fadil, "Analisis Pengembangan E-Office Dalam Pelaksanaan E-Government Pada Dinas Komunikasi, Statistik Dan Persandian Kota Bekasi," Bachelor's thesis, 2022.
- [9] A. N. Maulidiyah, "Implementasi Transformasi Digital Pelayanan Nikah Pada KUA Kecamatan Blimbing: Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III," Master's thesis, 2023.
- [10] A. Rachman, H. Purnomo, and A. I. Samanlangi, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2024.
- [11] N. P. Sitanggang, "Hegemoni Kekuasaan Dalam Wacana Konseptualisasi Objek Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah," Master's thesis, vol. 7, 2022.
- [12] D. Susianto, E. Ridhawati, and S. Sucipto, "Implementasi E-Government Berbasis Android Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains dan Teknologi*, vol. 7, no. 3, p. 179, 2022. doi: 10.36722/sst.v7i3.1143.
- [13] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 2010.
- [14] M. B. Miles and A. M. Huberman, *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*, 2nd ed., 2014.
- [15] F. Yudha and A. S. Kurniawan, "Peran Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karangmangu dalam Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga di Desa Pondoknongko Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi," *At Tamkin*, vol. 2, no. 1, 2022.